

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Effendie, Bachtiar, 1981, *Kumpulan tulisan tentang HUKUM TANAH*, Alumni, Bandung.

Helmi, Dr., 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

M. Syarief, Laode., dan Andri G. Wibisana. 2010. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Perrow, M. R., and A. J. Davy, editors. 2002. *Handbook of Ecological Restoration. Volume 1: Principles of Restoration*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Salim, Hs, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soektanto, Soerjono ,2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta,

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota  
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian WIUP.

Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kaupaten Bantul Tahun 2011-2030.

Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu dilingkungan Sungai dan Pesisir.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204 tahun 2014 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/ 2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

## Penelitian

Dati Nuryanti, (2016) *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi(S1), Fakultas Hukum Unpas.

## Publikasi

Hendaryanto, B. E, “ Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, ( Dipresentasikan dalam FGD “ Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP”, Jakarta, 2016), 20.

## Internet

Herman, Danny Z, “ Pertambangan Tanpa Izin ( PETI ) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Sekala Kecil “  
[http://psdg.geologi.esdm.go.id/buletin\\_pdf\\_file/Bul%20Vol%201%20no.%202%20thn%202006/6.WPR-2006\\_pak%20danny%20z%20herman\\_.pdfv](http://psdg.geologi.esdm.go.id/buletin_pdf_file/Bul%20Vol%201%20no.%202%20thn%202006/6.WPR-2006_pak%20danny%20z%20herman_.pdfv)  
diakses pada 3 maret 2018.

Zulkarnain, Iskandar, “ Pertambangan Illegal di Indonesia dan Permasalahanya “,  
<http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Illegal%20di%20Indonesia.pdf>  
diakses pada 3 maret 2018.

Kabupaten Bantul “Sistem Informasi Manajemen Kewilayahan Berbasis WEBGIS Kabupaten Bantul” <http://kewilayahan.Bantulkab.go.id/rtrw.php?mod=10>.

Yusron, Mustaqim,” Nambang pasir tanpa izin Tiga Warga Divonis 6 Bulan”,  
<https://www.harianmerapi.com/Bantul/2018/02/26/8645/nambang-pasir-tanpa-izin-tiga-warga-divonis-6-bulan>.

Pengadilan Negeri Bantul, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”,  
[http://sipp.pn-Bantul.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pn-Bantul.go.id/index.php/list_perkara) 296/Pid.Sus/2017.